

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA KUJANGSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

(Studi Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah Pengrajin Gula Merah)

Tofan Ibrahim

Email: tofaniibrahim94@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar

Abstrak

Program pemberdayaan usaha kecil menengah tidak berjalan dengan optimal kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Kujangsari. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang salah satunya mengenai distribusi barang yang diproduksi oleh pelaku usaha gula merah mengalami pelambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara terhadap 7 orang informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembinaan dan kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produsen atau pelaku UKM dan memberikan ide variasi terhadap produk UKM yang akan dijual. Para pelaku UKM yang dibina baru sebagian saja, sehingga kegiatan ini tidak merata atau menyeluruh bagi semua pelaku UKM di Desa Kujangsari. Sedangkan program yang dibuat oleh pihak desa Kujangsari mendapat dukungan penuh dari semua pihak dan tidak ada yang menolak atau menentang terhadap kegiatan pemberdayaan usaha kecil menengah ini.

Kata Kunci: Implementasi Pemberdayaan, UKM

Abstract

The empowerment program of small and medium businesses does not run optimally to small and medium business actors in Kujangsari Village. This is due to various problems, one of which is the distribution of goods produced by the business of brown sugar experiencing a slowdown. This study uses a qualitative approach. There were several data collection techniques, namely literature study, field study consisting of observation and interviews with 7 informants, and documentation study. The results are coaching and outreach activities aim to improve the ability of SME producers or entrepreneurs and provide various ideas for Small Medium Enterprise products to be sold. There are only part of the SME players who have been fostered, so this activity is not evenly distributed or comprehensive for all SME players in Kujangsari Village. Meanwhile, the program created by the village of Kujangsari received full support from all parties and no one rejected or opposed these small and medium enterprise empowerment activities.

Keywords: Empowerment Implementation, MSEs

PENDAHULUAN

Berbagai Program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kujangsari melalui kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder terkait yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Kujangsari yang salah satunya pemberian modal usaha, pembinaan, pelatihan bagi pelaku usaha kecil menengah dengan tujuan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Desa Kujangsari.

Berdasarkan observasi peneliti dalam kenyataannya program pemberdayaan tidak berjalan dengan optimal kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Kujangsari. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang salah satunya mengenai:

1. Distribusi barang yang diproduksi oleh pelaku usaha gula merah mengalami pelambatan selain dikarenakan modal usaha dimana jika dijual langsung ke luar kota maka memerlukan biaya yang cukup besar dan kapasitasnya harus lebih banyak pula, juga produksi air nira sebagai bahan baku yang semakin sedikit sehingga pelaku usaha terkadang menjual kepada tengkulak yang meskipun harganya lebih murah sehingga gula merah banyak didistribusikan oleh tengkulak ke luar seperti Kota Bandung.
2. Kualitas gula merah yang diproduksi belum mampu bersaing dipasaran dengan produk lokal lainnya, pasar lebih menginginkan produk gula yang asli yang tidak dicampur dengan bahan baku lainnya sehingga produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha gula merah tersebut kurang mampu bersaing di pasaran sekitarnya baik dipasar Banjar, maupun Langensari padahal jika mampu dijual langsung ke pasaran harga jualnya menjadi lebih baik dan keuntungannya juga lebih banyak.

Oleh karena itu guna meningkatkan perekonomian diperlukan program pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil

menengah di Desa Kujangsari. Sebelumnya Pemerintah Desa Kujangsari telah melaksanakan program pemberdayaan bagi kelompok usaha kecil menengah di berbagai bidang namun karena kurang berkelanjutan sehingga yang sebelumnya pelaku usaha kecil menengah di Desa Kujangsari dari berbagai bidang tersebut misalnya pembuatan sale, kue kering, kerajinan bambu, batu bata merah, gula merah, sekarang yang mampu bertahan hanya pelaku usaha batu bata merah dan gula merah. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab usaha kecil dan menengah merupakan penopang perekonomian bagi masyarakat khususnya Desa Kujangsari umumnya Kota Banjar.

Oleh karena itu pembinaan juga pendampingan harus terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Desa Kujangsari kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar tingkat pengangguran semakin berkurang, pendapatan masyarakat juga kesejahteraan masyarakat di Desa Kujangsari menjadi lebih baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengetahui implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pengerajin gula merah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Menurut pendapat Wijaya dan Supardo, (Pasolong, 2010:57) menyatakan bahwa: “ implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek”. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Ripley dan Franklin

(Winarno, 2012:148) menyatakan bahwa: 'Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).' Lebih lanjut Grindle, (Winarno, 2012:149) menyatakan bahwa: "secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah". Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa implmentasi merupakan suatu tindakan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau orang yang memiliki kewenangan guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan kebijakan. Dalam hal ini implementasi memiliki makna pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Udoji, (Wahab, 2010: 59) dengan tegas mengatakan bahwa:

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga (3) aspek hal, yaitu berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang diarahkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal ini implementasi guna mencapai tujuan pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat di Desa Kujangsari.

Proses Implementasi

Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh pengambil keputusan yang bersifat politik. Weimer dan Vining (Subarsono, 2011:103) mengemukakan 3 variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Winarno, (2012:121-125) mengemukakan unsur-unsur implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Birokrasi

Dalam sistem politik modern, umumnya kebijakan publik diimplementasikan terutama oleh sistem badan-badan administrasi yang kompleks. Badan-badan administrasi melakukan tugas pemerintah sehari-hari, dan dengan demikian mempengaruhi warga negara secara langsung dalam tindakan-tindakan. Oleh karena itu birokrasi memiliki keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan publik yang berada dalam yuridiksinya. Sekalipun badan administrasi merupakan aktor utama implementasi kebijakan publik, sejumlah aktor lain dan lembaga terlibat pula dalam implementasi. Sebagaimana menurut Franklin dan Ripley (Winarno, 2012:222) mengemukakan: "implementation process involve many important actors holding diffuse and competing who work within a contexts of an incresingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layer adn unity of government and who are affected by powerful factors beyond their control.

Lembga legislatif

Politik dan administrasi merupakan kegiatan yang terpisah, oleh karena itu politik mempunyai erat kaitannya dengan perumusan masalah yang harus ditangani cabang-cabang politik dari pemerintah, dalam arti cabang eksekutif dan legislatif. Di sisi lain berkaitan dengan implementasi keputusan lebih banyak dilakukan oleh cabang politik, dan ditangani oleh badan-badan administratif. Badan legislatif sekarang ini lebih berperan dalam proses implementasi kebijakan terutama dalam hal merancang undang-undang.

Lembaga peradilan

Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks memengaruhi tata kelola/administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan administratif serta regulasi dalam pengkajian ulang keputusan-keputusan administrasi. Oleh karena itu lembaga peradilan dapat memfasilitasi, menghambat, atau secara luas mementahkan implementasi kebijakan-kebijakan tertentu terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

Organisasi Masyarakat

Pada tingkat lokal organisasi masyarakat sering terlibat langsung dalam implementasi program-program publik. Di samping itu juga partai politik juga terlibat dalam implementasi kebijakan sehingga dapat memengaruhi kebijakan tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, suatu kebijakan yang diimplementasikan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur pelaksana kebijakan sehingga dapat diukur mengenai kinerja pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan.

Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranarka (1996 : 72) yang mengartikan bahwa:

Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan suatu usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik sebagai individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu serta kelompok

Keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan atau kemampuan-kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan pada pemikiran kognitif (akal atau rasio), sedangkan tindakan berlandas pada

pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia.

Lebih lanjut Edwards III, (Agustino, 2012:149) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

Komunikasi.

Komunikasi lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan dalam kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan serta mentransmisikan kepada bagian lainnya secara tepat, akurat dan konsisten.

Sumber Daya.

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplmentasikan kebijakan karena sebagai faktor penunjang baik sumber daya manusia, sarana maupun hal lainnya yang mampu menunjang suatu keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan.

Disposisi Pelaksana.

Sikap dari pelaksana kebijakan menjadi penting mengenai suatu pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk emalksanakannya sehingga dalam prktiknya tidak terjadi bias.

Struktur Birokrasi.

Walaupun sumber-sumber unrtuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijaka yang tesediamaka dalam hal ini akan sebagian sumber-sumber menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Keempat variabel/faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan dan

konsisten, karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor serta memiliki kompleksitas dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan tersebut dalam hal ini tujuan pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pengrajin gula merah di Desa Kujangsari.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut Sugiyono, (2012: 213) yang menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif teori yang digunakan harus jelas, karena teori disini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam kaitannya dengan teori, kalau penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dalam penelitian kualitatif jumlah teori yang digunakan sesuai variabel yang diteliti oleh karena itu penelitian kualitatif harus bersifat "perspektif emic" artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagai mana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah, objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang sebenarnya sebagaimana adanya, data

yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, (Sugiyono, 2013:246) yang lebih dikenal dengan model analisis interaktif (interactive of model analysis). Analisis interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah memiliki Empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Komunikasi lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan dalam kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan serta mentransmisikan kepada bagian lainnya secara tepat, akurat dan konsisten.

Menurut simpulan peneliti bahwa ketepatan komunikasinya dengan para

pelaksana dan konsentensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan kepada sumber informasi, serta pemerataan sosialisasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM demi meningkatkan hasil UMKM. Dengan begitu komunikasi harus terjalin dengan baik agar tercapainya tujuan dari program pemberdayaan ini.

2. Sumber daya.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan karena sebagai faktor penunjang baik sumber daya manusia, sarana maupun hal lainnya yang mampu menunjang suatu keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan.

Kualitas suatu organisasi atau kelompok sangatlah bergantung pada kualitas orang-orang yang berada didalamnya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan UMKM harus ditingkatkan dan menciptakan kreativitas yang baru demi berjalannya UMKM yang ada di Desa Kujangsari. Usaha gula merah yang ada di Desa Kujangsari yang merupakan usaha warisan harus diadakan perubahan agar produk yang dihasilkan tidak konvensional.

Pada aspek sumber daya anggaran yang masih minim bagi pemberdayaan UMKM di Desa Kujangsari masih harus dicari solusinya, sedangkan untuk pelaku UMKM atau produsen telah diberi pembinaan untuk pengajuan pinjaman berupa modal usaha dalam mengembangkan hasil UMKM. Dengan kata lain sumber daya anggaran dalam pemberdayaan UMKM harus lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana dari pemerintah saja, namun berusaha sendiri dalam pengembangan UMKM yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

3. Disposisi Pelaksana.

Sikap dari pelaksana kebijakan menjadi penting mengenai suatu

pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Kualitas pemberdaya yang menentukan hasil di lapangan Hal ini mengacu pada implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Desa Kujangsari merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang salah satunya mengenai pemerataan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kujangsari.

4. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Implementasi program pemberdayaan bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya suatu program atau kebijakan. Terdapat dua karakteristik dari birokrasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Pihak Desa, penyuluh dan pelaku UMKM selalu berpedoman pada SOP yang telah ditentukan dalam implementasi program pemberdayaan. Di sisi lain diharapkan komunikasi tetap terjalin antara semua pihak agar setiap program dapat tercapai tujuannya.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Desa

Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Desa Kujangsari diantaranya yaitu:

1. Komunikasi yang tidak menyeluruh

Komunikasi yang terjadi antara pihak penyuluh dan pelaku usaha dinilai kurang interaktif, sehingga banyaknya pelaku usaha yang tidak aktif dalam kegiatan pemberdayaan program usaha kecil menengah. Komunikasi pada indikator ini yaitu berupa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

Pemberdayaan dalam indikator ini yaitu semua pelaku UMKM dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa maupun Dinas terkait. Hal ini bertujuan agar kemampuan yang dimiliki oleh produsen atau pelaku UMKM merata sehingga tidak terjadi *clusterisasi*.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang, menandakan program pemberdayaan ini belum berjalan secara maksimal. dalam melakukan implementasi pemberdayaan UMKM, hal yang harus disiapkan adalah sarana dan prasarana yang mendukung dalam perkembangan UMKM itu sendiri. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka produsen atau pelaku UMKM dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan promosi atau pemasaran produk dapat terdistribusikan secara baik.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan terhadap implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yaitu:

1. Aktif dan Partisipatif dari semua pihak

Sikap aktif dan partisipatif semua pihak yaitu menunjukkan kepedulian dan mendukung jalannya program

pemberdayaan. Peran aktif dan partisipasi dari pelaku UMKM dalam setiap mengikuti kegiatan yang diberikan oleh penyuluh sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Peranan ini juga melibatkan semua pihak terkait dalam perkembangan dan pengelolaan UMKM yaitu pelaku UMKM, Penyuluh pemberdaya, Desa dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).

2. Peningkatan sarana dan prasarana

Berjalannya suatu kebijakan atau program tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mendukung program yang telah ditetapkan. Peningkatan sarana yang dapat mendukung dan menunjang terhadap jalannya program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selain itu jumlah atau frekuensi dalam promosi produk hasil UMKM harus ditingkatkan lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, peneliti menyimpulkan bahwa,

1. Pembinaan dan kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produsen atau pelaku UKM dan memberikan ide variasi terhadap produk UKM yang akan dijual. Para pelaku UKM yang dibina baru sebagian saja, sehingga kegiatan ini tidak merata atau menyeluruh bagi semua pelaku UKM di Desa Kujangsari. Sumber daya yang ada saling berkaitan dengan pemberdayaan pada semua pihak baik pelaku UMKM, penyuluh pemberdayaan, pihak desa maupun pemerintahan kota Banjar. Kualitas pegawai atau penyuluh sudah bisa dikatakan baik jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan sikap yang disiplin. Sedangkan program yang dibuat oleh pihak desa Kujangsari mendapat dukungan penuh

dari semua pihak dan tidak ada yang menolak atau menentang terhadap kegiatan pemberdayaan usaha kecil menengah ini. Pihak Desa, penyuluh dan pelaku UMKM selalu berpedoman pada SOP yang telah ditentukan dalam implementasi program pemberdayaan. Di sisi lain diharapkan komunikasi tetap terjalin antara semua pihak agar setiap program dapat tercapai tujuannya.

2. Hambatan yang terjadi pada implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yaitu komunikasi yang tidak menyeluruh dan kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan itu yaitu sikap aktif dan partisipatif semua pihak yaitu menunjukkan kepedulian dan mendukung jalannya program pemberdayaan dan peningkatan sarana yang dapat mendukung dan menunjang terhadap jalannya program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selain itu jumlah atau frekuensi dalam promosi produk hasil UMKM harus ditingkatkan lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Desa Kujangsari. Saran tersebut antara lain:

1. Peneliti menyarankan, untuk pembinaan terhadap implementasi program pemberdayaan dilakukan secara menyeluruh dan memperhatikan berbagai aspek.
2. Peneliti menyarankan supaya hambatan dapat diminimalisasikan. Hal ini berkaitan dengan membangun komunikasi yang baik antara pihak desa, penyuluh dan pelaku UMKM.
3. Peneliti menyarankan semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dalam pembinaan dengan mengadakan BIMTEK dan pelatihan secara berkelanjutan dan mencari solusi

terkait penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- AmbarTeguh, Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwas, Oos. M. 2103. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gayo, Y. 1994. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. Jakarta: PT Pradnya.
- Herlyansah, Praditya. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang*. Serang: Universitas Ageng Tirtayasa.
- Hery. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gaya Media
- Makmur. 2003. *Pemberdayaan aparatur pemerintah dalam masyarakat*. Jakarta: STIA-LAN.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Onny.S.Prijono dan A.M.W. Pranarka. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta: CSIS.
- Pasolong. Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Prijono dan Pranarka, 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2013. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan ke-VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-17. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta..
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan*. Cetakan keenam. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. 1996. *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tricahyono, Sunit Agus. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, HAW. (2005) *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Caps.